

20
24



LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

Identifikas, Analisis, Penilaian,
Pengendalian, Realisasi dan Tindak Lanjut

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

c. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;

- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

d. Ruang Lingkup

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER DATA	URAIAN KELEMAHAN	KLASIFIKASI
1.	a. Surat Edaran Kode Etik Pegawai b. SP4N LAPOR	Harus melibatkan banyak pihak untuk memperkuat pengawasan	Penegakan integritas dan nilai etika
2.	Perjanjian Kinerja	Adanya mutasi dan perubahan rencana kerja sehingga perlu pembaruan perjanjian kinerja	Komitmen terhadap kompetensi
3.	Survei Kepuasan Masyarakat Internal OPD/ Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian harus obyektif beberapa hanya asal mengisi survey	Kepemimpinan yang kondusif
4.	Susunan SOTK OPD	Memerlukan beberapa penyesuaian uraian kinerja	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5.	a. Perjanjian kinerja b. Cascading kinerja	Adanya mutasi jabatan sehingga perlu penyesuaian perjanjian kinerja	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6.	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Perlu pemberian reward and punishment atas kinerja yang telah dilaksanakan	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
7.	Dokumen manajemen risiko dan SPIP	Perlu peningkatan terhadap evaluasi penilaian dan pengendalian risiko	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8.	Notulen rakor antar OPD	Perlu notulensi yang ditulis dari beberapa pihak yang turut hadir dalam rakor	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

b. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Harus melibatkan banyak pihak agar pengawasan kuat	Melakukan pembinaan dengan melibatkan beberapa pihak yang kompeten	Kepala OPD	Tribulan II
2	Adanya mutasi dan perubahan rencana kerja sehingga perlu pembaruan perjanjian kinerja	Membuat proses bisnis OPD beserta SOP untuk setiap kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas, serta melakukan pemutakhiran secara berkala	Kepala Bidang/ Sekretaris dan Kepala OPD	Tribulan II
3	Penilaian harus obyektif, beberapa hanya asal mengisi	Membuat survei singkat namun bisa mencakup seluruh informasi yang diperlukan, serta membuatnya anonim	Sekretaris	Tribulan II dan IV
4	Memerlukan beberapa penyesuaian	Melakukan review SOTK	Kepala OPD	Tribulan III
5	Adanya mutasi jabatan sehingga perlu pembuatan perjanjian kinerja baru	Membuat proses bisnis OPD beserta SOP untuk setiap kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas, serta melakukan pemutakhiran secara berkala	Kepala Bidang/ Sekretaris dan Kepala OPD	Tribulan II
6	Perlu memberikan reward and punishment atas kinerja yang dilaksanakan	Melakukan evaluasi internal OPD dan memberikan reward dan punishment untuk capaian kinerja tiap bidang	Kepala OPD	Tribulan I
7	Perlu peningkatan terhadap evaluasi penilaian dan pengendalian risiko	Melakukan evaluasi internal secara berkala	Kepala Bidang/ Sekretaris dan Kepala OPD	Tribulan I, II, III dan IV
8	Perlu notulensi yang ditulis dari beberapa pihak yang turut hadir dalam rakor	Membuat salinan notulensi dari pihak lain yang turut hadir dalam rapat	Kepala OPD, pelaksana rapat	Tribulan I, II, III dan IV

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

a. Penetapan Konteks Tujuan

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mengampu 2 tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah

Adapun penetapan konteks tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tertuang dalam tabel sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa:

Nama Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Periode	RPJMD 2021-2026
Urusan Pemerintahan	
Bidang	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peran Perangkat Daerah	
Sumber data	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan	Meningkatnya Kemandirian Desa
Sasaran strategis	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
IKU Renstra OPD	Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri
Informasi lain	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: Mewujudkan Desa yang Mandiri Sasaran Strategis: Meningkatnya Kemandirian Desa IKU: Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri

2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Nama Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Periode	RPJMD 2021-2026
Urusan Pemerintahan	
Bidang	Pertanian
Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peran Perangkat Daerah	
Sumber data	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan	Meningkatnya Kemandirian Desa
Sasaran strategis	1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat desa 2. Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan 3. Peningkatan keuangan desa 4. Penguatan kelembagaan desa 5. Pengembangan potensi-potensi ekonomi dan budaya desa
IKU Renstra OPD	1. Prosentase peningkatan jumlah desa mandiri 2. Nilai SAKIP perangkat daerah

Informasi lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan: Mewujudkan Desa yang mandiri</p> <p>Sasaran Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat desa 2. Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan 3. Peningkatan keuangan desa 4. Penguatan kelembagaan desa 5. Pengembangan potensi-potensi ekonomi dan budaya desa <p>IKU :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosentase peningkatan jumlah desa mandiri b. Nilai SAKIP perangkat daerah

b. Hasil Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi dilakukan sesuai dengan kode risiko sebagaimana berikut:

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor Urut Perangkat Daerah	Kode
ROO	24	00	13	21	ROO.24.00.13.21.01
ROO	24	00	13	21	ROO.24.00.13.21.02
ROO	24	00	13	21	ROO.24.00.13.21.03
ROO	24	00	13	21	ROO.24.00.13.21.04
ROO	24	00	13	21	ROO.24.00.13.21.05
ROO	24	00	13	21	ROO.24.00.13.21.06

Berikut adalah hasil identifikasi risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uarian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
Risiko Strategis									
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Prosentase Desa yang tertata dengan baik	RSO.24.00.13.21.01	DPMD	Batas wilayah desa tidak diketahui dengan jelas	Internal	C	Wilayah desa tidak tertata	Desa / Pemerintah Daerah
2	Prosentase kerjasama antar desa yang berjalan dengan baik	Penguasaan kemampuan manajerial dalam mengelola BUMDesa yang kurang memadai	RSO.24.00.13.21.02	DPMD	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	Internal	C	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat	Desa / Pemerintah Daerah
3	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	Keterbatasan tenaga ahli operator aplikasi di desa	RSO.24.00.13.21.03	DPMD	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Internal	C	Keterlambatan pelaporan berbasis aplikasi	Desa / Pemerintah Daerah
4	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	Aset Desa yang belum terinventarisir	RSO.24.00.13.21.04	DPMD	Data mengenai aset desa tidak ada	Internal	C	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan	Desa / Pemerintah Daerah
5	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	APBDesa tidak tepat waktu	RSO.24.00.13.21.05	DPMD	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	Internal	C	1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Siltap Kades dan perangkat tidak bisa dicairkan	Desa / Pemerintah Daerah
6	Prosentase Lembaga	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari	RSO.24.00.13.21.06	DPMD	Jumlah perwakilan	Internal	C	Kemajuan lembaga	Desa /

	Kemasyarakatan Desa yang aktif	lembaga					Desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen			kemasyarakatan desa menjadi terhambat	Pemerintah Daerah
7	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa			RSO.24.00.13.21.07	DPMD	Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan	Internal	C	PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan	Desa / Pemerintah Daerah
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
Risiko Operasional											
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Prosentase Desa yang tertata dengan baik	Tahap Pelaksanaan	Kurang lengkapnya tanda batas wilayah desa	ROO.24.00.13.21.01	DPMD	Batas wilayah desa tidak diketahui dengan jelas	Internal	C	Desa tidak tertata	Desa / Pemerintah Daerah
2	Fasilitasi kerjasama antar desa	Prosentase kerjasama antar desa yang berjalan dengan baik	Tahap Pelaksanaan	Penguasaan kemampuan manajerial dalam mengelola BUMDesa yang kurang memadai	ROO.24.00.13.21.02	DPMD	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	Internal	C	tidak bisa berkembang dan jalan dilempat	Desa / Pemerintah Daerah
3	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	Tahap Pelaksanaan	Keterbatasan tenaga ahli Operator aplikasi di desa	ROO.24.00.13.21.03	DPMD	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Internal	C	latan pelaporan berbasis aplikasi	Desa / Pemerintah Daerag
4	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	Tahap Pelaksanaan	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.24.00.13.21.04	DPMD	Data mengenai aset desa tidak ada	Internal	C	itan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan	Desa / Pemerintah Daerah
5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	Tahap pelaksanaan	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.24.00.13.21.05	DPMD	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	Internal	C	1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Siltap Kades dan Perangkat tidak bisa dicairkan	Desa / Pemerintah Daerah
6	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Tahap Pelaksanaan	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.24.00.13.21.06	DPMD	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Internal	C	Kemajuan lembaga kemasyarakatan desa menjadi terhambat	Desa / Pemerintah Daerah
7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Tahap Pelaksanaan	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK Desa	ROO.24.00.13.21.07	DPMD	Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK Desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan	Internal	C	Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan	Desa / Pemerintah Daerah

b. Hasil Analisis Risiko

Berikut adalah hasil analisis risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

1. Urusan pertanian

No	Risiko Teridentifikasi	Kode	Analisis		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
	Risiko Strategis				
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	RSO.24.00.13.21.01	5	4	20
2	Prosentase kerjasama antar desa yang berjalan dengan baik	RSO.24.00.13.21.02	5	4	20
3	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	RSO.24.00.13.21.03	5	4	20
4	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	RSO.24.00.13.21.04	5	4	20
5	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	RSO.24.00.13.21.05	5	4	20
6	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	RSO.24.00.13.21.06	5	4	20
7	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	RSO.24.00.13.21.07	5	4	20
	Risiko Operasional				
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	ROO.24.00.13.21.01	5	4	20
2	Fasilitasi kerjasama antar desa	ROO.24.00.13.21.02	5	4	20
3	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	ROO.24.00.13.21.03	5	4	20
4	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	ROO.24.00.13.21.04	5	4	20

5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	ROO.24.00.13.21.05	5	4	20
6	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	ROO.24.00.13.21.06	5	4	20
7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	ROO.24.00.13.21.07	5	4	20

d. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Berikut adalah pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Risiko Prioritas	Kode	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik	Target Waktu
RISIKO STRATEGIS							
1	Kurang lengkapnya tanda batas wilayah desa	RSO.24.00.13.21.01	Sosialisasi Batas Desa	-	Sosialisasi Batas Desa	DPMD – Bidang Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam mengelola BUMDesa yang kurang memadai	RSO.24.00.13.21.02	Pelatihan Admin BUMDesa	-	Pelatihan Admin BUMDesa	DPMD – Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi Desa	RSO.24.00.13.21.03	Bimtek Kapasitas Operator Desa	-	Bimtek Kapasitas Operator Desa	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
4	Aset Desa yang belum terinventarisir	RSO.24.00.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Desa	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
5	APBDesa tidak tepat waktu	RSO.24.00.13.21.05	Monev APBDesa	-	Monev APBDesa	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	RSO.24.00.13.21.06	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK Desa dan kurang beragamnya program TP PKK Desa	RSO.24.00.13.21.07	Pelatihan Administrasi PKK	-	Pelatihan Administrasi PKK	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
RISIKO OPERASIONAL							
1	Kurang lengkapnya tanda batas wilayah desa	ROO.24.00.13.21.01	Sosialisasi Batas Desa	-	Sosialisasi Batas Desa	DPMD – Bidang Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam mengelola BUMDesa yang kurang memadai	ROO.24.00.13.21.02	Pelatihan Admin BUMDesa	-	Pelatihan Admin BUMDesa	DPMD – Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi Desa	ROO.24.00.13.21.03	Bimtek Kapasitas Operator Desa	-	Bimtek Kapasitas Operator Desa	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV

4	Aset Desa yang belum terinventarisir	ROO.24.00.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Desa	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
5	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.24.00.13.21.05	Monev APBDesa	-	Monev APBDesa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.24.00.13.21.06	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK Desa dan kurang beragamnya program TP PKK Desa	ROO.24.00.13.21.07	Pelatihan Administrasi PKK	-	Pelatihan Administrasi PKK	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV

e. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

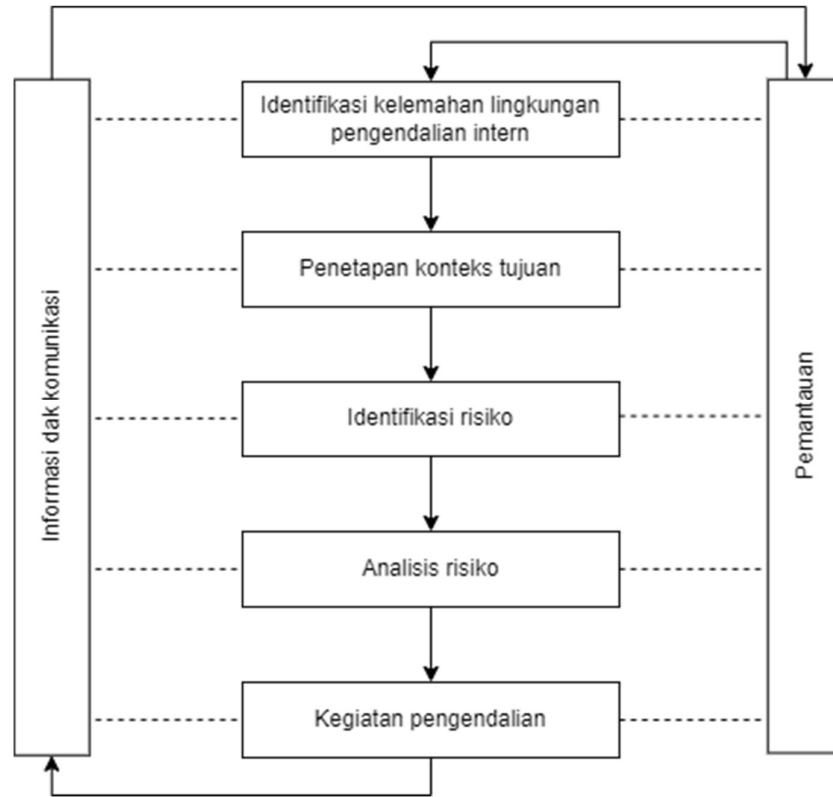
Berdasarkan pelaksanaan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, berikut adalah penilaian atas kegiatan pengendalian yang masih ada dan masih dibutuhkan:

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Kurang lengkapnya tanda batas wilayah desa	Sosialisasi Batas Desa	DPMD – Bidang Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam mengelola BUMDesa yang kurang memadai	Pelatihan Admin BUMDesa	DPMD – Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi Desa	Bimtek Kapasitas Operator Desa	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
4	Aset Desa yang belum terinventarisir	Pelatihan Kelembagaan Desa	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
5	APBDesa tidak tepat waktu	Monev APBDesa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK Desa dan kurang beragamnya program TP PKK Desa	Pelatihan Administrasi PKK	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam melaksanakan pengendalian risiko secara optimal, maka diperlukan rancangan informasi dan komunikasi antar pemilik risiko dan pihak-pihak yang terlibat. Rancangan informasi dan komunikasi antar pemilik risiko digambarkan dalam bagan sebagaimana berikut:



Adapun rancangan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Saran Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
RESIKO STRATEGIS						
1	Sosialisasi Batas Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pemeritahan Desa	Pemeritahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
2	Pelatihan Admin BUMDesa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Pemeritahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
3	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemeritahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemeritahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
5	Monev APBDesa	Kegiatan	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemeritahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
6	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemeritahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
7	Pelatihan Administrasi PKK	Kegiatan	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemeritahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV

	RESIKO OPERASIONAL					
1	Sosialisasi Batas Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
2	Pelatihan Admin BUMDesa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
3	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
5	Monev APBDesa	Kegiatan	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
6	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV
7	Pelatihan Administrasi PKK	Kegiatan	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut adalah rancangan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

1. Urusan pertanian

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Saran Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	RESIKO STRATEGIS						
1	Sosialisasi Batas Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
2	Pelatihan Admin BUMDesa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
3	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
5	Monev APBDesa	Kegiatan	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
6	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan

7	Pelatihan Administrasi PKK	Kegiatan	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
RESIKO OPERASIONAL							
1	Sosialisasi Batas Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
2	Pelatihan Admin BUMDesa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
3	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
5	Monev APBDesa	Kegiatan	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
6	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kegiatan	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan
7	Pelatihan Administrasi PKK	Kegiatan	DPMD – Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemerintahan Desa	Tribulan I, II, III, dan IV	Tribulan I, II, III, dan IV	Perlu Peningkatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, dapat disimpulkan bahwa potensi-potensi risiko yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.